

**KEBUDAYAAN NASIONAL DAN
KETAHANAN BANGSA**
Meneropong Jiwa Nasionalisme Masyarakat Kontemporer

Himyari Yusuf

Abstrak

Kebudayaan nasional secara struktural ada kaitannya dengan ketahanan bangsa. Sebab ketahanan bangsa merupakan salah satu sub sistem dari kebudayaan nasional. Dengan kata lain bagaimana karakteristik kebudayaan nasional dapat dilihat pada ketahanan bangsa, atau pada jiwa nasionalis masyarakat, dan sebaliknya, jiwa nasionalis juga dapat merupakan cerminan dari kebudayaan nasional. Persoalannya adalah bahwa, baik kebudayaan nasional maupun ketahanan bangsa dan jiwa nasionalis masyarakat bangsa pada dekade akhir-akhir ini tidak terlihat secara jelas kesejatiannya, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang sedang menggelabal saat ini. Secara reflektif ketidak jelasan itu menunjukkan bahwa tidak konsistennya masyarakat bangsa ini terhadap kometmen yang telah dibangun bersama, yaitu Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkebudayaan. Artinya secara idealita kebudayaan nasional adalah kebudayaan Pancasila. Persoalan tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan kefilosafatan, dan secara kontempaltif akan menghasilkan tampilan kebudayaan nasional yang berkaitan dengan ketahanan bangsa dan hakikat jiwa nasionalis yang sejatinya, sesuai dengan kerohanian masyarakat bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *“Kebudayaan Nasional, Ketahanan Bangsa dan Jiwa Nasionalis Masyarakat Bangsa”*.

Pendahuluan

Peradaban dunia dewasa ini telah disatukan oleh arus globalisasi, batas-batas yang disebut negara, ciri-ciri suku bangsa apalagi etnis sudah sukar untuk dipertahankan, karena semuanya

dipaksa harus mengglobal, tidak terkecuali dalam hal kebudayaan. Berdasarkan tampilan arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, maka pemikiran tentang situasi kemanusiaan adalah sangat penting dikaji dan dibicarakan, mengingat berbagai problem yang dihadapi manusia sudah sangat mendesak untuk mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh, mendasar dan rasional. Apalagi berbagai problem dimaksud secara kausalitas disebabkan oleh perkembangan pemikiran manusia sendiri¹.

Menurut Kuntowijoyo di balik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya, dunia modern sesungguhnya menyimpan potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Kemajuan tersebut pada satu sisi telah berhasil membangun peradaban yang maju untuk dirinya sendiri, namun disisi lain manusia telah menjadi tawanan dari hasil-hasil ciptaan atau karyanya sendiri². Pandangan ini, mengisyaratkan bahwa pada era sekarang ini menuntut harus segera ada upaya filterisasi, atau daya tangkal yang radikal dan mendalam atas implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghancurkan martabat kemanusiaan. Artinya upaya semacam itu sekaligus untuk mengangkat kembali harkat dan martabat kemanusiaan yang sesungguhnya, agar kehidupan manusia tidak terlalu jauh mengalami stress, galau, tidak menentu dan gangguan mental kerohanian yang lebih serius. Harus ada upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan kebudayaan.

Paradigma kemajuan masyarakat modern, secara faktual dan esensial sangat erat kaitannya dengan sistem kebudayaan, atau jelasnya seperti apa kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari tampilan kebudayaannya. Menurut Mudji Sutrisno, bila proyeksi atau rancangan budaya manusia ditopangkan pada primat yang rohani, yang suci, yang luhur pada dirinya sendiri atau nilai (bukan materi) dari manusia, kemungkinan realisasi jejak-jejak perjalanan manusia

¹ Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2010), hal. 231.

² Kontowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, (Mizan, Bandung, 1991), hal. 159.

juga kearah yang rohani, yang kekal dan tidak cuma berhenti berpaku pada yang permukaan belaka³. Ditegaskan lagi, yang menentukan kebudayaan itu adalah kompas dasar langkah pengembangan si manusia dengan kebudayaannya itu. Bila nilai religius yang dipilih lebih dari yang materi, bila primat jiwa atau sukma dikedepankan lebih dari yang sementara, maka perjalanan kebudayaan manusia bisa diharapkan menapak menuju ke yang kekal dan abadi⁴.

Pandangan Mudji Sutrisno tersebut di atas, secara kontemplatif mengandung makna bahwa kebudayaan itu akan dibentuk seperti apa, sangat tergantung dengan pilihan masyarakatnya, jika masyarakat menginginkan kebudayaan yang berkarakteristik religius, maka dasar yang harus dikedepankan adalah nilai-nilai religius, spiritual dan sebagainya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa secara esensial kebudayaan itu sangat tergantung dengan keinginan masyarakat pemangku kebudayaan bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan Mudji Sutrisno bahwa kebudayaan itu merupakan kekayaan esensial yang tidak hanya manusia individu sendiri-sendiri, tetapi pula sebagai kelompok sosial, bangsa dalam peranannya memberi nilai-nilai. Kebudayaan merupakan jantung hidup masyarakat, ia adalah hati pembentuk, pengembang, pematang, serta pemelihara manusia-manusia di dalamnya⁵.

Atas dasar pandangan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kebudayaan dengan manusia yang mendukungnya. Dengan perkataan lain, tampilan suatu kebudayaan sangat erat kaitannya dengan karakteristik masyarakat dimana kebudayaan itu dikembangkan. Dapat dikatakan, jika suatu kebudayaan mencerminkan atmosfer yang religiusitas, spiritualitas, dan moralitas, maka niscaya mentalitas masyarakat pendukungnya

³ Mudji Sutrisno, *Filsafat Kebudayaan Ikhtiar Sebuah Teks*, (Hujan Kabisat, Yogyakarta, 2008), hal. 16.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hal. 17

juga mantap dan kuat dalam kebersamaan sebagai implikasi dari religiusitas, spiritualitas dan moralitas.

Berbeda halnya dengan kebudayaan yang terlepas dari religiusitas dan spiritualitas, yang hanya mementingkan atau mengedepankan material kebendaan semata. Dengan perkataan lain kebudayaan semacam itu adalah kebudayaan yang hanya berdasarkan pada nilai-nilai material kebendaan dan tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral. Tampilan kebudayaan semacam ini pasti bertolak belakang dengan nilai-nilai hakiki kemanusiaan⁶. Abdullah mengemukakan, kebudayaan pada era globalisasi telah menghadirkan perbedaan-perbedaan yang meruntuhkan totalitas kesatuan nilai-nilai dan kepercayaan manusia⁷.

Lebih tegas Adelbert mengemukakan bahwa pada dasarnya kebudayaan Barat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia lebih terarah kepada dunia luar (fisik kebendaan). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi segala bidang kehidupan dengan teknik alam yang ditaklukkan dan dikuasai, sementara dunia batin (spiritual) menjadi sekunder bahkan diabaikan begitu saja⁸. Dalam konteks ini Russell pun ikut menjelaskan tampilan peradaban tersebut di atas, menurutnya ada dua hal penting yang menjadi kelemahan, yaitu runtuhnya otoritas agama dan menguatnya otoritas ilmu pengetahuan, sehingga kebudayaan modern kering dari nuansa agama (religius, spiritual dan moral), bahkan simbol agama diganti oleh otoritas politik yang menjadi kontrol kebudayaan⁹.

Russel menambahkan, bahwa semenjak revolusi Amerika dan Prancis lahirlah kebudayaan baru yaitu kebudayaan *liberalis* yang

⁶ Himyari Yusuf, *Op. Cit.*, hal. 231

⁷ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007), hal. 107.

⁸ Adelbert OFM. Snijders, *Antropologi Filsafat, Manusia Paradoks & Seruan*, (Kanisius, Yogyakarta, 2004), hal. 61-62.

⁹ With Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and its Connection Political and social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day* (Sejarah Filsafat Barat Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002), hal. 645.

dikaitkan dengan sistem perdagangan dan ekonomi kapitalis. Oleh karena pertikaian yang sangat tajam antara agama dan ilmu pengetahuan, maka dunia pemikiran manusia berjalan secara parsial atau suatu sistem berpikir yang tidak lengkap karena sistem berpikir yang mengakitkan spiritual, dan moral menjadi terabaikan¹⁰.

Relevan dengan pandangan Russel, mengulas hal yang sama bahwa dampak dari profesionalisme ilmu pengetahuan telah melahirkan banyak keganjilan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya kemajuan yang dicapai dunia modern hingga kontemporer yang menjadikan dunia mengglobal telah membuat krisisnya hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama termasuk membuat galaunya perilaku manusia terhadap lingkungannya¹¹. Manusia kini menurut Ma'arif hidup dengan peradaban modern yang sekuler. Peradaban yang menguasai globalisasi adalah peradaban yang lahir dari konstitusi hati yang beku, dan materialistis. Peradaban semacam ini akan berimplikasi pada lenyapnya nilai-nilai moralitas¹². Pandangan Ma'arif ini dapat diinterpretasi bahwa peradaban yang tanpa hati nurani, sekuler, dan materialistis, dapat dipastikan akan mengganggu kenyamanan hidup manusia, baik secara individu, maupun sosial masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena peradaban semacam itu niscaya bertentangan dengan hakikat kemanusiaan, yang seharusnya tidak boleh berkecambah di negara yang berfalsafah Pancasila.

Demikian paradigma kebudayaan modern yang saat ini sudah melanda seluruh kebudayaan masyarakat dunia dan tidak terkecuali kebudayaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu persoalan yang sangat mendasar adalah, apakah hakikat kebudayaan nasional itu, dan

¹⁰ *Ibid*, hal. 246.

¹¹ Alfred North Whitehead, *Science and the Modern World* Terjemahan Komaruddin (Sains dan Dunia Modern, (Nuansa, Bandung, 2005), hal. 216-217.

¹² A. Syafei Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia*, (Mizan, Bandung, 1994), hal 17-18.

bagaimana hubungan kebudayaan nasional dengan ketahanan Bangsa, serta adakah kebudayaan nasional masih menjadi jiwa nasionalisme masyarakat bangsa Indonesia. Persoalan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini dan kajiannya akan menggunakan pendekatan khas kefilosofan, dengan tujuan agar pengkajian ini dapat menyentuh sampai kepada hakikat yang paling mendasar, dan dapat menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia untuk kembali atau tetap mempertahankan identitas dan jatidirinya sebagai masyarakat Indonesia yang berkebudayaan religius, spiritual dan moral, yaitu suatu kebudayaan yang sesuai dengan manusia totalitas atau manusia yang seutuhnya.

Hakikat Kebudayaan Nasional

Kebudayaan di satu ruang hidupnya memberi acuan nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup. Ruang ini memuat pandangan hidup dunia dan cita kedepan mengenai apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang indah. Dalam bahasa akademik, di satu sisi kebudayaan merupakan tata acuan nilai-nilai hidup perjalanan bermartabat anak-anak dari rahimnya, baik sebagai individu maupun komunitas¹³. Artinya di dalam kebudayaan nasional terdapat ruang yang muatannya adalah falsafah hidup yang isinya mengenai pedoman hidup yang benar, yang baik, dan yang indah, dan atau menjadi acuan nilai-nilai hidup yang bermartabat. Dengan perkataan lain, kebudayaan itu mengandung nilai-nilai yang telah dipadatkan menjadi falsafah hidup dan berfungsi sebagai pedoman untuk menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Secara etimologi kebudayaan berasal dari kata *buddhayah* yang berarti budi atau akal, dengan demikian kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal¹⁴. Kebudayaan dapat pula dimaknai sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang berakal dan isinya adalah

¹³ Mudji Sutrisno, *Ranah-Ranah Kebudayaan*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009), hal. 147.

¹⁴ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (bumi Aksara, Jakarta, 2007), hal. 137.

perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk mengkaji, memahami dan menginterpretasikan berbagai hal yang dihadapi dan guna mendorong tindakan-tindakan positif yang diperlukan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kebudayaan adalah pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia, maka secara ontologis kebudayaan dapat dipahami sebagai produk dari eksistensi manusia, yang meliputi semua aspek kegiatan manusia, baik dibidang sosial, politik, ekonomi, kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun agama. Oleh karena itu secara sosial, tampilan suatu kebudayaan dapat digambarkan dalam hubungan-hubungan kekerabatan, baik individu maupun kemasyarakatan, dalam tradisi adat istiadat yang terpelihara dan terselenggara dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan lain sebagainya¹⁵, termasuk dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat dan bernegara.

Asy'arie menegaskan bahwa hakikat kebudayaan yang sesungguhnya lebih dilihat sebagai proses transendensi dari eksistensi diri manusia. Hakikat kebudayaan adalah proses kreatif diri manusia yang aktual dalam menjawab tantangan yang dihadapinya, sehingga ia dapat melampaui dunia tubuhnya, melepaskan diri dari dorongan-dorongan darah daging tubuhnya, menuju proses pencerahan spiritual yang agung, dengan menghayati makna kehidupan rohaninya dalam sepanjang kehidupan, sehingga sebagai makhluk yang mulia di bumi, manusia mampu melakukan perubahan dan penciptaan yang lebih baik¹⁶.

Pandangan Asy'arie di atas tentunya semakin menegaskan bahwa hakikat kebudayaan adalah manusia dan kemanusiaan. Maksudnya adalah kebudayaan itu merupakan hasil kreatifitas manusia dalam menghadapi dan menjawab berbagai tantangan kehidupan. Kreativitas semacam ini secara filosofis melampaui fisik

¹⁵ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (LESPI, Yogyakarta, 1999), hal. 63.

¹⁶ *Ibid*, hal. 68-69.

material dan menuju mental spiritual, karena penghayatan terhadap makna kehidupan dilakukan secara menyeluruh dan mendasar, artinya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat material saja, tetapi juga melampauinya. Hasil dari kreativitas semacam ini pula yang menjadi hakikat kebudayaan pada umumnya, dan hakikat kebudayaan nasional khususnya.

Eksistensi kebudayaan secara struktural memiliki unsur-unsur. Kebudayaan dalam pengertian ini mengandung makna totalitas, oleh karena itu dikenal unsur-unsur universal dalam kebudayaan¹⁷. Unsur-unsur dalam kebudayaan terdapat tujuh unsur, yaitu *pertama sistem religi dan keagamaan*. Manusia sebagai makhluk religius memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur, tanggap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang Maha Besar yang dapat menghitam putihkan kehidupan manusia. Unsur *kedua* adalah *sistem organisasi kemasyarakatan*. Sebagai makhluk atau homo sosius manusia sadar bahwa tubuhnya lemah, karena itu perlu adanya organisasi untuk membangun kerjasama yang saling menguatkan dalam meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan hidup. Unsur *ketiga* adalah *sistem pengetahuan*. Sebagai makhluk atau homo *sapiens* manusia berkemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahuinya kemudian menyampaikannya dengan orang lain melalui bahasa, sehingga pengetahuan menjadi menyebar luas. Unsur *keempat* adalah *sistem ekonomi*. Sebagai makhluk *economicus* maka haruslah terjadi peningkatan-peningkatan untuk kemajuan, manusia harus memiliki mata pencaharian. Unsur *kelima* adalah *sistem teknologi*. Sebagai *homo faber* manusia memiliki kecerdasan, sehingga selain manusia mampu menciptakan juga sekaligus mampu mempergunakan hasil ciptaannya. Unsur *keenam* adalah *bahasa*. Sebagai *homo longuens* manusia memiliki bahasa untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan segala yang dibutuhkan dan sekaligus manusia bisa memahami simbol-simbol termasuk simbol bahasa. Unsur *ketujuh* adalah *kesenian*. Sebagai *homo esteticus* manusia mempunyai kebutuhan fisik dan psikis. Kedua kebutuhan ini tentunya harus

¹⁷ Surajiyo, *Op. Cit.*, hal. 138.

terpenuhi secara seimbang, maka setelah kebutuhan fisik terpenuhi berikutnya adalah pemenuhan yang estetik¹⁸. Unsur-unsur kebudayaan tersebut merupakan sebuah struktur, maka satu dengan lainnya tidak terpisahkan.

Berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa kebudayaan nasional adalah hasil produk manusia atau masyarakat nusantara yang bersumber dari gagasan, ide pemikiran dan hasil kreatifitas dalam menjawab berbagai kebutuhan kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (Material dan spiritual). Singkatnya bahwa kebudayaan (termasuk kebudayaan nasional) secara ontologis adalah manusia secara totalitas dan universal, manusia yang meliputi jiwa dan raga. Kemudian secara epistemologis dapat dipahami sebagai yang bersumber dari pengalaman hidup manusia, baik pengalaman spiritual religius, maupun pengalaman fisik material. Oleh karena itu dapat dipastikan secara aksiologis, kebudayaan merupakan pedoman bagi kehidupan manusia dalam segala aspek, termasuk mengenai kehidupan menegara dan cinta terhadap kedamaian serta kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.

Kebudayaan nasional adalah sebagai puncak kebudayaan daerah, yang di dalamnya merupakan panduan seluruh lapisan kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencerminkan semua aspek kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional adalah totalitas berdasarkan aspek kerohanian bangsa dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia Indonesia¹⁹. Oleh karena itu kebudayaan nasional dengan segala unsurnya, seperti bahasa, kesenian, agama dan adat istiadat

¹⁸ *Ibid*, hal. 139-140. Mengenai unsur-unsur Kebudayaan ini dapat dilihat secara lebih luas dan terinci di dalam Buku Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, 1983. Kemudian Baca pula Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*, 2013. Di dalam buku ini unsur-unsur Kebudayaan dijelaskan dengan makna Filosofis yang di dalam masing-masing unsur tersebut.

¹⁹ Surajiyo, *Op. Cit.*, hal. 141.

dalam seluruh wilayah dan suku-suku bangsa harus dilestarikan secara keseluruhan, agar kebudayaan tetap terjaga dan terpelihara.

Relevan dengan penjelasan di atas, Mudji Sutrisno mengemukakan dalam alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 memuat pengakuan bahwa kemerdekaan bangsa yang pluralis menjadi negara Republik Indonesia yang merdeka adalah merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat dituliskan prinsip-prinsip dasar acuan proses kebudayaan dalam percaturan dunia dan dalam visi peradaban yang ditaruh dalam prinsip ber-ke-Tuhanan, dimana pertama-tama kebudayaan yang majemuk serta pluralitas ke Indonesiaan mendasarkan peradabannya dari religiositas²⁰. Pandangan ini dapat diinterpretasi bahwa kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang secara implisit dan eksplisit terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Ini artinya menunjukkan kebudayaan nasional merupakan kumpulan dari kebudayaan seluruh masyarakat nusantara, dan oleh karena itu kebudayaan nasional bersifat pluralistik, atau disebut kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang mengandung nilai keber-Tuhanan, dan oleh karena itu peradaban yang diturunkan dari kebudayaan tersebut adalah religiositas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai kebudayaan nasional secara hukum dan politik pada tanggal 18 Agustus 1945 telah secara resmi dipadatkan menjadi pandangan hidup atau falsafat hidup bangsa yang disebut Pancasila (alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 1945). Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijadikan sebagai sumber dan arah pengembangan kebudayaan nasional. Artinya, jika berbicara kebudayaan nasional berarti tidak boleh dipisahkan dengan Pancasila sebagai dasar dan sumber kebudayaan Indonesia. oleh karena itu Mudji Sutrisno menambahkan bahwa strategi kebudayaan dan proses pengembangan kebudayaan mendasarkan fokus arahnya pada kemartabatan kemanusiaan yang

²⁰ Mudji Sutrisno, *Ranah-Ranah Kebudayaan*, *Op. Cit.*, hal. 69.

dalam relasi menghayati perbedaan, namun harus tetap adil dan menghayati kebersamaan berdasarkan hormat kemanusiaan itu secara beradab²¹.

Berdasarkan hakikat kebudayaan nasional tersebut di atas, maka kebudayaan nasional tidak boleh anti kemanusiaan universal atau kemanusiaan secara utuh. Artinya kebudayaan yang tidak terlepas dari keber-Tuhanan dan kebermartabatan manusia. Dengan demikian di dalam dan juga pada fokus kebudayaan nasional seharusnya tidak ada tempat bagi paham sekuler, materialis, apalagi atheis dan dehumanisasi. Oleh karena itu secara fungsional kebudayaan nasional merupakan pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa atau untuk memperkuat jatidiri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu kebudayaan nasional juga sebagai pedoman dalam perubahan dan pembangunan dalam segala bidang kehidupan dan juga untuk memperkuat solidaritas sesama manusia²². Fungsi kebudayaan nasional seperti ini semakin memperkuat bahwa Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai kebudayaan seluruh anak bangsa harus menjadi sumber inspirasi dalam seluruh gerak langkah pembangunan manusia Indonesia dalam segala bidang kehidupan.

Kebudayaan Nasional dan Ketahanan Bangsa

Terdapat banyak pandangan yang dapat menghubungkan kebudayaan nasional dengan ketahanan Bangsa. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kebudayaan yang telah dipadatkan menjadi falsafah hidup merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa falsafah hidup tersebut juga sekaligus sebagai pedoman mengenai ketahanan bangsa. Dengan perkataan lain, falsafah hidup dan dasar negara sudah mengandung keharusan untuk

²¹ *Ibid.*

²² Surajiyo, *Op. Cit.*, hal. 143.

mempertahankan bangsa dari segala gangguan, baik gangguan yang datang dari luar, maupun dari dalam.

Berdasarkan unsur-unsur kebudayaan yang telah dikemukakan sebelumnya, secara reflektif menunjukkan adanya koherensi antara kebudayaan dan ketahanan bangsa. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut secara struktural merupakan satu kesatuan yang bulat. Artinya nilai-nilai dari unsur-unsur kebudayaan nasional juga merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Misalnya nilai religi atau keagamaan, nilai sosial kemasyarakatan, sistem kebahasaan dan lainnya adalah nilai yang integratif dan holistik. Oleh karena itu tidak dapat diragukan bahwa nilai-nilai tersebut yang memformulasi mengadanya falsafah hidup bangsa dan sekaligus menjadi dasar keharusan ketahanan bangsa.

Mudji Sutrisno mengemukakan anyaman dan rajutan tata nilai agar hidup bersama bermartabat sebagai manusia membuat jalan budaya menjadi jalan peradaban²³. Ketika negara Republik Indonesia dalam visi jalan budaya sekaligus berbahasa kultural politis atau politik kultural menuliskan cita-citanya untuk bertanggungjawab pada rakyat Indonesia dan sebagainya dirumuskanlah pokok-pokok kewajiban dan tugas negara dalam alinea keempat pembukaan:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
- b) Memajukan kesejahteraan umum
- c) Mencerdaskan peri kehidupan bangsa dan
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial²⁴.

Pandangan tersebut di atas secara kontemplatif mengisyaratkan bahwa persoalan ketahanan bangsa adalah kebudayaan dan sekaligus merupakan cerminan tanggungjawab negara terhadap rakyatnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa konsistensi terhadap kebudayaan nasional berarti komitmen terhadap falsafah hidup bangsa dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam setiap langkah

²³ Mudji Sutrisno, *Ranah-Ranah Kebudayaan*, *Loc. Cit.*, hal. 147.

²⁴ *Ibid*, hal. 148.

dan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu berarti sudah memperkuat ketahanan bangsa. Namun sebaliknya, jika falsafah hidup bangsa hanya sekedar fatamorgana, citraan kosong tanpa makna, tersingkir dari segala bentuk kebijakan dan aturan, maka itu berarti melemahkan ketahanan bangsa. Kebudayaan dan falsafah hidup bangsa merupakan dua sisi mata pedang, yang satu dengan lainnya harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga terwujudlah ketahanan bangsa.

Paradigma Kebudayaan dan Jiwa Nasionalis Masyarakat Pada Era Globalisasi

Globalisasi pada satu sisi telah berhasil memudahkan beberapa aspek kehidupan manusia, namun di sisi lain harus diakui telah merobohkan bangunan kemanusiaan universal. Kehidupan manusia hanya dipandang dari segi lahirnya saja sementara segi batinnya tergilas dan dibuat tidak berdaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ma'arif, tren gaya hidup global, alam dieksploitasi dengan cara yang sangat tamak dan kepongahan peradaban. Kemajuan hanya diukur dengan dan dalam matrik pertumbuhan ekonomi, capaian teknologi dan pengembangan informasi yang pada kenyataannya sedikit sekali manfaat bagi manusia²⁵. Menurut Pilliang, beberapa garis besar fenomena sosial dan kebudayaan yang menandai interaksi manusia pada abad ke-21 yang telah menciptakan berbagai bentuk deterritorialisasi kebudayaan, yakni tercerabutnya kebudayaan-kebudayaan dari teritorialnya untuk kemudian berputar dalam ruang kapitalisme global tanpa henti lewat berbagai media yang saling silang menyilang sebelum semua menjadi lenyap ditelan arus kecepatan globalisasi²⁶.

Pandangan kedua tokoh di atas, secara esensial menunjukkan kesamaan bahwa kebudayaan pada era globalisasi sudah tercerabut

²⁵ A. Syafei Ma'arif, *Op. Cit.*, hal. 23.

²⁶ Yasraf Amir Pilliang, *Post Realitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (jalasutra, Yogyakarta, 2004), hal. 132.

dari akar kemanusiaan, dan menampakkan kebudayaan yang tidak berpri-kemanusiaan. Paradigma semacam ini tidak terkecuali telah terjadi di Indonesia. Kebudayaan asli Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai keluhuran sebagaimana telah dijelaskan, dicampakkan begitu saja dan digantikan dengan kebudayaan sekuler, libralis, kapitalis dan materialis.

Pendeknya dapat dipahami bahwa paradigma kebudayaan pada era global sekarang ini telah jauh menggeser nilai-nilai kebudayaan yang sesungguhnya. Nilai-nilai kebudayaan manusia universal telah digantikan dengan kebudayaan yang bersifat materialistik, kapitalistik yang terfokus semata-mata kepada kebendaan. Dimensi spiritual, religius, dan moral (kemanusiaan) dipandang sebagai yang tidak berarti apa-apa bagi kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri akibat tidak mampu untuk membendung arus kebudayaan dari luar (dari Barat sekuler), maka kebudayaan nasional juga telah tercerabut dari akar yang sesungguhnya. Pancasila sebagai cerminan kebudayaan bangsa juga ikut tergilas oleh keganasan globalisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah, bahwa sistem politik yang dilakukan pemerintah atau oleh yang berkuasa di negari ini adalah politik yang seakan memaksakan membuat nilai-nilai masyarakat menjadi nilai-nilai yang harus mengikuti era globalisasi. Politik pemerintah yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat (kearifan lokal) pasti dapat mengalami kegagalan, dan melahirkan sikap yang otoriter yang kemudian akan berujung pada anarkhis, bengis dan menakutkan²⁷.

Berdasarkan paradigma kebudayaan nasional yang terjadi pada era globalisasi tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Indonesia senyatanya telah kehilangan identitas dan jatidirinya. Tampilan kebudayaan dan peradaban tidak lagi mencerminkan manusia Indonesia yang sebenarnya. Keringnya spiritualitas dan religiusitas menyebabkan putusnya rasa kesetiakawanan atau solidaritas. Anarkhisme menunjukkan hilangnya sikap sopan santun dan moralitas. Sikap hidup individualistik mematikan perilaku tolong menolong bagi sesama dan lain

²⁷ Abdullah, 2007, 76

sebagainya. Tampilan kehidupan semacam ini selain sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia, juga secara kausalitas mematikan jiwa nasionalisme masyarakat bangsa Indonesia. Jiwa nasionalis tercabik-cabik seiring dengan lunturnya nilai-nilai kebudayaan nasional yang sejatinya. Masyarakat Indonesia menampilkan sikap pongah, cenderung tidak peduli terhadap keadaan bangsa, persatuan dan kesatuan cenderung berubah menjadi individualistik, hapusnya sikap tolong menolong dan sebagainya. Oleh sebab itu sudah waktunya untuk berpikir mencari jalan keluar yang tepat dengan strategi-strategi yang pas dengan kebatinan dan kerohanian masyarakat Indonesia yang sejatinya.

Strategi Keluar dari Kemelut Kebudayaan Nasional

Sudah menjadi kelaziman bahkan menjadi suatu tuntutan, ketika suatu tampilan peradaban tidak sejalan dengan hati nurani atau hakikat kemanusiaan, harus segera dikembalikan pada empunya. Hal ini secara filosofis termasuk sebagai upaya penyelamatan kemanusiaan dari keterpurukan yang lebih dahsyat dan mematikan. Singkatnya, keterpurukan kebudayaan nasional yang telah berimplikasi pada melemahnya ketahanan bangsa seperti disebutkan di atas, harus segera dipulihkan dan dikembalikan pada kebudayaan yang sehat, kebudayaan yang sesuai hati nurani masyarakat Indonesia, kebudayaan yang sesuai jatidiri masyarakat bangsa.

Strategi untuk keluar dari kemelut kebudayaan nasional sebagaimana tersebut di atas, secara epistemologis harus kembali memperhatikan dan mempertimbangkan dan sekaligus menjadikan nilai-nilai fundamental kemanusiaan masyarakat asli Indonesia sebagai sumber kebudayaan. Bukankah para pendiri bangsa telah menetapkan nilai-nilai luhur kebudayaan anak bangsa menjadi dasar dan falsafah hidup bangsa yang disebutkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 spesifik pada alinea keempat yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai falsafat hidup bangsa, artinya semua harus sepakat baik dari kalangan elit penguasa maupun dari kalangan

masyarakat biasa, seluruhnya harus mendudukan kembali Pancasila sebagai sumber kreativitas dan aktivitas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mencerminkan kebudayaan nasional yang Pancasila. Pihak penguasa yang berwewenang untuk melahirkan kebijakan-kebijakan publik misalnya harus bersumber pada Pancasila, dan masyarakat dalam menjalani kehidupan juga tidak boleh bersebrangan dengan Pancasila. Kembali kepada nilai-nilai asli bangsa Indonesia merupakan keharusan dan strategi paling jitu untuk menyelamatkan manusia atau kebudayaan nasional dari musibah kemanusiaan yang sedang menghadang dewasa ini.

Pandangan di atas sejatinya bukan tidak beralasan, bukan tidak rasional, karena secara esensial filosofis muatan nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan agama, terutama agama Islam. Misalnya konsep ke-Tuhanan dalam Islam identik dengan keyakinan akan adanya Tuhan dan Tuhanlah pencipta seluruh alam semesta. Persatuan identik dengan persaudaraan, dan seterusnya. Singkatnya berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila sekaligus merupakan cerminan nilai-nilai yang dianjurkan oleh Islam. Dengan demikian mengkonkretisasi nilai-nilai Pancasila berarti sekaligus mengejawantahkan nilai-nilai Islam (ibadah) serta mengkonstruksi kebudayaan nasional yang humanis teosentris, yaitu suatu kebudayaan yang mengandung nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan.

Catatan Penyimpulan

Sebagai catatan penyimpulan dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kebudayaan asli anak bangsa merupakan suatu kebudayaan yang mencerminkan kemanusiaan totalitas dan universal, di dalamnya terkandung berbagai nilai luhur, seperti nilai religius spiritual, nilai sopan santun atau moral, nilai kebersamaan, tolong menolong, dan juga nilai keadilan. Nilai-nilai luhur tersebut telah dikristalisasi menjadi dasar dan falsafah hidup bangsa yang disebut Pancasila.

Namun pada era globalisasi dewasa ini nilai-nilai asli anak bangsa yang sudah menjadi dasar dan falsafah hidup Pancasila telah tergeser mengikuti dan terhegemoni oleh kebudayaan asing yang

sekuler, liberalis, kapitalis dan materialistis (bersifat kebendaan), tanpa sipiritual, religius dan moral. Gaya hidup individualistik, hedonistik, merupakan hal yang mendominasi kehidupan manusia era globalisasi dewasa ini. Oleh sebab itu untuk mengembalikan dan dalam rangka penyelamatan masyarakat bangsa dan kebudayaan nasional serta ketahanan bangsa dan jiwa nasionalisme dari keterpurukan yang lebih parah, maka diperlukan upaya keras dari semua kalangan anak bangsa, terutama dari para penguasa yang sedang berkuasa di negeri ini.

Sebagai strategi paling jitu untuk menyelamatkan manusia dari musibah kemanusiaan atau musibah kebudayaan nasional, adalah masyarakat Indonesia harus kembali memikirkan dan mengaktualisasi nilai-nilai yang menjadi identitas dan jatidiri masyarakat bangsa yang sebenarnya, yaitu nilai-nilai yang telah dipadatkan menjadi dasar dan falsafah hidup bangsa yang disebut Pancasila. Aktualisasi atau konkretisasi nilai-nilai Pancasila berarti ikut menyelamatkan bangsa, kebudayaan bangsa, dan ketahanan masyarakat bangsa, serta membangkitkan jiwa nasionalisme masyarakat bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Amir Pilliang, Yasraf, *Post Realitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*, LESPI, Yogyakarta, 1999.
- Kontowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung, 1991.

- Ma'arif, A. Syafei, *Peta Bumi Intelektualisme Islam Di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1994.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Geramedia, Jakarta, 1983.
- OFM. Snijders, Adelbert, *Antropologi Filsafat, Manusia Paradoks & Seruan*, Kanisius, Yogyakarta, 2004.
- Russell, With Bertrand, *History of Western Philosophy and its Connection Political and social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day* (Sejarah Filsafat Barat Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno hingga Sekarang), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sutrisno, Mudji, *Filsafat Kebudayaan Ikhtiar Sebuah Teks*, Hujan Kabisat, Yogyakarta, 2008.
- , *Ranah-Ranah Kebudayaan*, kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Yusuf, Himyari, *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Whitehead, Alfred North *Science and the Modern World* Terjemahan Komaruddin, *Sains dan Dunia Modern*, Nuansa, Bandung, 2005.